**USULAN PENYEMPURNAAN
PASAL-PASAL TERKAIT PIDANA AGAMA
DALAM RKUHP**

**DIUSULKAN OLEH
ALIANSI ADVOKASI PASAL PIDANA AGAMA RKUHP**

ILRC, Paritas, Wahid Foundation, YLBHI, LBH Jakarta, Lakpesdam NU, Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) UGM, Indonesian Consortium for Religious Studies – Yogyakarta, PUSAD Paramadina, Gusdurian, HRWG, INKLUSIF, ASEAN Parliamentarians for Human Rights, SEAFORB Network, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, SEPAHAM Indonesia, Humanesia, Amnesty International Indonesia, LeIP, ICJR

8 Oktober 2020

Daftar Isi

BAGIAN I: Dasar Pertimbangan untuk Penyempurnaan.....	3
1) Masalah-masalah terkait hukum “penodaan” agama	4
2) Apa alternatif yang tersedia?.....	6
3) Apa yang bisa dilakukan?.....	8
BAGIAN II: Usulan Penyempurnaan Pasal-Pasal dalam RKUHP.....	9
Judul Bab VII	9
Pasal 304-305.....	9
Pasal 306.....	12
Pasal 307.....	12
Pasal 308.....	13
Pasal 309 dan 483(a)	14

BAGIAN I

Dasar Pertimbangan untuk Penyempurnaan Pasal-Pasal Pidana Agama dalam RKUHP

RKUHP (versi September 2019) memiliki satu bab khusus yang berjudul “Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama”. Dua kandungan utamanya adalah “penodaan” atau permusuhan terhadap agama dan beberapa tindakan lain yang mengganggu hak untuk beragama atau beribadah. Dalam Naskah Akademik RKUHP (2015), di awal pembahasan bab tersebut, istilah yang digunakan adalah *blasphemy* dan “offenses relating to religion” dengan rujukan pada beberapa negara. Menurut Naskah tersebut, persoalan ini perlu diatur karena agama merupakan sendi utama dalam hidup bermasyarakat di Indonesia; yang ingin dihindari adalah “perbuatan tercela dengan tidak menghormati agama atau umat beragama yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, atau umat beragama yang bersangkutan, termasuk terhadap sarana ibadah.”

Dalam paparannya di Konferensi tentang Hukum Penodaan Agama (Agustus 2020)¹, Heiner Bielefeldt (Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, 2010-2016) menyampaikan bahwa “penodaan agama” (*blasphemy*) atau ujaran yang memusuhi agama memang terjadi—ada orang-orang yang memang ingin melukai perasaan keagamaan orang lain, dan ada orang yang terluka. Meskipun demikian, menurutnya, suatu UU pidana tentang penodaan agama adalah jawaban yang keliru atas persoalan itu. UU semacam itu tidak menyelesaikan masalah, justru memunculkan banyak masalah lain, sebagaimana akan dibahas di bawah. Karenanya, menurutnya, perlu dicari jawaban-jawaban baru yang lebih kreatif.

Paparan ini mengusulkan jawaban baru itu, untuk memperbaiki pasal-pasal terkait dalam RKUHP. Salah satu sumber penting yang menginspirasi jawaban itu adalah Resolusi Dewan HAM PBB No. 16/18 (2011) tentang melawan intoleransi, yang diinisiasi oleh Organisasi Kerjasama Islam, dimana Indonesia menjadi anggotanya. Sumber lain yang lebih terinci adalah Rencana Aksi Rabat untuk untuk pelarangan advokasi kebencian nasional, rasial dan keagamaan (2012).

¹ Paparan di sini sebagiannya didasarkan pada diskusi yang berlangsung di Konferensi tersebut, yang merupakan hasil kolaborasi beberapa pusat akademik di universitas bersama organisasi masyarakat sipil Indonesia. Konferensi daring itu berlangsung dalam empat sesi, pada tanggal 18-27 Agustus 2020, menghadirkan narasumber dari unsur pemerintahan, parlemen, masyarakat sipil, dan akademisi dalam dan luar negeri, termasuk Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan.

Bagian pertama dari tulisan ini menunjukkan beberapa masalah dalam legislasi mengenai tindak pidana terkait agama, sebagaimana halnya Naskah Akademik RKUHP, juga menunjukkan konteks di luar Indonesia sebagai perbandingan dan sumber pelajaran. Bagian kedua menunjukkan alternatif berbeda untuk mencapai tujuan pengaturan tersebut, untuk mengatasi kekurangan-kekurangan pengaturan tindak pidana terkait agama yang ada dalam RKUHP kini. Bagian terakhir adalah kesimpulan.

1) Masalah-masalah terkait hukum “penodaan” agama

Dalam beberapa tahun terakhir ini, sebagaimana ditunjukkan beberapa penelitian, kasus-kasus terkait penodaan agama meningkat secara signifikan. Penelitian terakhir yang dilakukan YLBHI menunjukkan bahwa dalam rentang waktu yang cukup singkat, antara Januari-Mei 2020, ada 36 kasus. (Bandingkan dengan data di tahun-tahun sebelumnya, setelah tahun 2000, yang jauh lebih kecil, rata-rata 6 kasus per tahun.)

Dalam perundang-undangan di Indonesia yang berlaku hingga kini, apa yang disebut dalam RKUHP sebagai “Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama” telah muncul dengan beberapa rumusan yang berbeda. Terkait “penodaan” agama, pengaturan yang utama adalah UU No.1/PNPS/1965 dan Pasal 156A KUHP. Dalam perkembangan berikutnya, UU No. 17/2013 tentang Ormas memperluasnya dengan istilah “penistaan” dan “penodaan”. Dalam UU tentang Ormas disebut pula tentang “tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan”; sementara UU No. 11/2008 tentang ITE (dan UU No. 19/2016 tentang perubahan atasnya) berbicara tentang “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Sedangkan peraturan pidana yang khusus menyangkut rumah ibadah tidak ditemukan.

Dalam Naskah Akademik, salah satu rujukan untuk perlunya pasal pidana terhadap agama (khususnya penodaan agama) adalah perbandingan dengan negara-negara lain. Seperti ditunjukkan Naskah tersebut, karakteristik UU semacam itu berbeda dari satu negara ke negara lainnya; beberapa UU lebih diskriminatif dibanding yang lain. Meskipun demikian, dalam penelitian global (2017) yang lebih sistematis dan mutakhir, salah satu temuan utamanya adalah bahwa semua UU tersebut, termasuk yang terbaik sekalipun, tetap bersifat diskriminatif atau melanggar beberapa hak dalam tingkatan yang berbeda.²

Dalam penelitian itu, UU terkait penodaan agama di Indonesia dinilai lebih buruk dibanding negara-negara seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Bangladesh, Jerman, Kanada, atau Irlandia. Penelitian tersebut mengukur aspek formal dan material UU penodaan agama (*blasphemy*). Dalam Konferensi Hukum Penodaan Agama 2020, Joelle Fiss, penulis laporan

² Joelle Fiss and J. Kestenbaum, *Respecting Rights? Measuring the World's Blasphemy Laws*, USCIRF, 2017.

tersebut, menyampaikan bahwa dalam penelitian lanjutan (akan diterbitkan pada Desember 2020), yang melihat aspek implementasinya/*enforcement*, Indonesia ternyata lebih buruk. Sementara dalam aspek formal dan material UU (cakupan UU dan jenis hukumannya), Indonesia termasuk berada di pertengahan, bukan termasuk yang terburuk tapi juga jauh di bawah banyak negara lain, Indonesia termasuk dalam 10 negara terburuk di dunia dalam hal penerapan (*enforcement*) hukum penodaan agama, untuk periode tahun 2014-2018. Indonesia dipandang cukup unik karena, berbeda dengan banyak negara lain yang memiliki hukum seperti ini, sesungguhnya konstitusi mengakui kebebasan beragama, dan negara tidak berdasarkan agama, namun hukum diskriminatif seperti itu tetap ada, bahkan makin kerap digunakan.

Dalam hal aspek materialnya, karakteristik yang ada dalam hukum penodaan agama di hampir semua negara adalah dalam hal asas legalitasnya, termasuk kekaburan tentang apa yang disebut penodaan agama, sehingga memungkinkan penafsiran yang terlalu luas. Terkait UU penodaan agama di Indonesia kelemahan dalam asas legalitas itu sesungguhnya telah muncul dalam pengujian pertama atas UU No.1/PNPS/1965 (2010).³

Di luar aspek hukum, hal lain yang terungkap dari Konferensi tersebut adalah bahwa, sebagaimana halnya hukum serupa di banyak negara lain, tindak pidana terhadap agama, khususnya penodaan agama, telah menjadi insentif legal untuk tindakan intoleran, melalui mekanisme pelintiran kebencian (*hate spin*), yang dipahami sebagai *manufacture of religious offense* (rekayasa ketersinggungan agama).⁴ Alih-alih menjaga ketertiban masyarakat, UU semacam itu justru merusaknya. Kasus-kasus yang pernah terjadi menunjukkan bahwa kelompok yang kuat (yang dicirikan bukan sebagai mayoritas, tapi sebagai yang memiliki kekuatan mobilisasi massa) adalah pihak yang biasanya cenderung memaksakan penggunaan UU itu dengan tekanan massa kepada polisi dan jaksa untuk menindaklanjuti laporan mereka sebagai kasus pidana, juga kepada hakim dalam proses persidangan.

Ada kelemahan lain yang terungkap dalam Konferensi melalui testimoni beberapa kelompok keagamaan Indonesia yang terdampak UU tersebut. Yaitu bahwa UU itu amat diskriminatif dan merugikan mereka. Hak yang terlanggar bukan hanya hak untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan, tapi juga hak-hak lain, termasuk akses pada pendidikan, perumahan, kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya. Dengan semua alasan di atas, hukum pidana mengenai penodaan agama perlu ditinjau ulang.

³ Lihat terutama kesaksian ahli Edward O. S. Hiariej dan Amir Hamzah dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*, hal. 210 dan 212.

⁴ Ini diungkapkan dalam Konferensi di antaranya oleh Ihsan Ali Fauzi dalam penelitian atas beberapa kasus konflik kekerasan dan pengadilan penodaan agama. Lihat juga Cherian George, *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya Bagi Demokrasi*, PUSAD Paramadina, 2017.

2) Apa alternatif yang tersedia?

Ada kekhawatiran yang kerap diajukan bahwa, bagaimanapun, UU penodaan agama diperlukan agar tidak terjadi kekosongan hukum, yang akan justru lebih berbahaya. Anggapan ini, yang disampaikan para hakim MK ketika menguji UU No.1/PNPS/1965, kerap disampaikan mantan Menteri Agama Lukman H. Saifuddin,⁵ juga muncul dalam buku *Moderasi Beragama* yang kini menjadi rujukan kebijakan di Kementerian Agama. Dalam buku itu, diakui bahwa beberapa kebijakan keagamaan, termasuk tentang pencegahan penodaan agama, “tidak sepenuhnya meningkatkan sikap moderat dalam beragama dan menghindarkan konflik. Namun, jika regulasi keagamaan tersebut dihilangkan, maka konflik-konflik keagamaan akan lebih banyak terjadi.”⁶

Namun, seperti dikutip di atas, Bielefeldt bukannya mengingkari kenyataan adanya pernyataan permusuhan terhadap agama yang berpotensi menimbulkan konflik. Yang jadi persoalan adalah jawaban bagi masalah itu. Hukum pidana telah terbukti tidak menjawab persoalan, dan memiliki banyak karakteristik negatif (diskriminatif, penyebab pelanggaran beberapa hak, lemah dalam asas legalitas, dan memberikan insentif legal untuk intoleransi). Lebih jauh, ada argumen lain untuk meninjau pasal penodaan agama dalam RKUHP, yaitu bahwa sesungguhnya ada alternatif lain yang lebih baik untuk menjawab persoalan-persoalan yang biasanya dijawab dengan suatu hukum pidana tentang penodaan agama.

Ini sesungguhnya sejalan dengan saran Mahkamah Konstitusi ketika menolak permohonan untuk pencabutan UU No.1/PNPS/1965. Meskipun permohonan ditolak, para hakim MK mengakui potensi diskriminasi UU itu dan perlunya mencari suatu jalan lain yang tak merusak kerukunan dan keragaman Indonesia. Karenanya para hakim MK menganjurkan dilakukannya suatu revisi.⁷ Sayangnya, setelah hampir satu dasawarsa, saran tersebut belum ditindaklanjuti oleh pemerintah maupun DPR. RKUHP yang kini sedang didiskusikan adalah kesempatan emas untuk merespon saran tersebut.

Pertanyaannya, kemanakah arah revisi itu? Adakah sumber normatif untuk merumuskan suatu jawaban baru dan kreatif? Beberapa pakar dari dalam dan luar negeri dalam Konferensi UU Penodaan Agama 2020 menunjukkan jalan itu dengan sangat lugas. Setidaknya ada **dua sumber norma utama** yang dapat membantu kita, yang telah berkembang sejak tahun 2011 di dunia internasional, dimana Indonesia aktif berpartisipasi.

⁵ “Alasan Menteri Agama Tak Ingin Pasal Penodaan Agama Dihapus” (<https://m.tempo.co/read/news/2017/05/17/063876236/alasan-menteri-agama-tak-ingin-pasal-penodaan-agama-dihapus>), 17 Mei 2017.

⁶ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019, hal. 110.

⁷ Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009, hal. 304-305.

Pertama: Pada tahun 2011, atas dukungan Organisasi Kerjasama Islam (dimana Indonesia menjadi anggotanya), Dewan HAM PBB mensahkan dengan suara bulat Resolusi 16/18 mengenai Melawan Intoleransi.⁸ Menarik dicatat bahwa Resolusi tersebut adalah hasil evolusi dari sejarah yang bermula 12 tahun sebelumnya dengan suatu usulan resolusi tentang “penodaan agama”. Sejarah itu berujung pada Resolusi Melawan Intoleransi, yang menunjukkan pergeseran signifikan yang seharusnya menjadi cermin bagi perancangan RKUHP.

Beberapa karakteristik sentral yang tampak dari pergeseran “penodaan agama” menjadi “melawan intoleransi” adalah:

- 1) subjek yang dilindungi kini adalah orang/umat beragama, yang dibedakan dari pretensi melindungi agama, yang sebetulnya berarti perlindungan penafsiran satu kelompok saja, dan karenanya cenderung diskriminatif;
- 2) “penodaan agama” sebagai suatu peristiwa yang tidak dikehendaki harus dibedakan dari perbedaan pemahaman keagamaan yang merupakan realitas sejarah agama-agama; “penodaan agama” adalah upaya sengaja untuk melukai perasaan orang lain, yang merupakan hasutan untuk menimbulkan kebencian, diskriminasi, bahkan kekerasan;
- 3) kemunculan peristiwa “penodaan agama” (dalam pemahaman di atas, sebagai sesuatu yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan kebencian, permusuhan, kekerasan) disebabkan oleh intoleransi; karena itu yang perlu disasar adalah intoleransi—termasuk intoleransi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap oleh suatu kelompok lain sebagai “sesat”.

Kedua: Setahun setelah Resolusi 16/18 diterima, pada tahun 2012 disahkan dokumen lain, yaitu Rencana Aksi Rabat untuk Pelarangan Advokasi kebencian nasional, rasial dan keagamaan, yang merupakan hasutan untuk diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan. Salah satu tujuan utama Rencana Aksi ini adalah untuk mengidentifikasi aksi/Tindakan yang mungkin dilakukan di semua ranah (pemerintah, masyarakat, dunia internasional).

Rencana Aksi ini sudah jauh lebih terinci dibandingkan Resolusi 16/18. Salah satu dokumen lain yang dibuat adalah dokumen satu halaman yang memuat kriteria dan *threshold* terinci untuk menentukan apa yang disebut kebencian, permusuhan, hasutan, dan sebagainya; tingkatan atau intensitasnya, yang diperhitungkan dari konteks, posisi pelaku, dan sebagainya. Lebih jauh, respon tindakan yang disarankan menunjukkan bahwa tidak semua tindakan di atas mesti direspon dengan suatu hukum pidana; dialog dan pendidikan terus menerus untuk menumbuhkan toleransi dianggap sebagai jalan utama. Jika, di atas *threshold*

⁸ Judul lengkapnya: “Combating Intolerance, Negative Stereotyping and Stigmatization of, and Discrimination, Incitement to Violence, and Violence against Persons Based on Religion or Belief”.

tertentu, ia menjadi bagian dari hukum pidana pun, hukumannya bisa beragam, atau bertingkat, tidak harus berupa pemenjaraan.

3) Apa yang bisa dilakukan?

Kedua norma itu ditindaklanjuti dan diperkuat dalam beberapa pertemuan Istanbul Process, juga dalam Deklarasi Beirut mengenai “Faith for Rights” (2017). Melihat makin menguatnya norma-norma baru ini, dan komitmen Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam semua perumusan di atas, perumusan RKUHP seharusnya dapat mengambil manfaat dari hasil deliberasi tersebut. Suatu jawaban alternatif atas persoalan kita (“penodaan agama” dalam pemahaman luasnya, dan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di banyak negara lain) dapat dibangun dengan memperhatikan kedua norma tersebut.

Dengan demikian, ada dua pilihan yang dapat dilakukan:

- (i) penghapusan pasal mengenai penodaan/penistaan agama;
- (ii) perumusan ulang redaksi pasal-pasal tersebut menjadi pengaturan terkait hasutan untuk kebencian, diskriminasi, permusuhan dan kekerasan atas dasar agama atau keyakinan.

Terkait pilihan kedua, perlu ditambahkan bahwa karena kompleksitas persoalan agama, secara umum penyelesaian non-pidana perlu dipertimbangkan, dan sanksi pidana diterapkan secara hati-hati untuk kasus-kasus tertentu saja yang telah mencapai *threshold* tertentu. Setelah itu semua, harus diakui bahwa bagaimanapun semua konsep di atas masih membuka ruang untuk penafsiran yang justru bisa merugikan tujuan pasal ini untuk menjaga ketertiban umum/kerukunan dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan. Karena itu, pasal-pasal tersebut perlu disertai dengan penjelasan yang terinci mengenai batasan penafsiran dan *threshold* untuk konsep atau istilah-istilah di atas. Usulan yang diajukan dalam halaman-halaman berikutnya dari naskah ini mengambil pilihan kedua di atas.

BAGIAN II

Usulan Penyempurnaan Pasal-Pasal dalam RKUHP⁹

Judul Bab VII

No	Bab / Pasal	Rekomendasi / Usulan perbaikan
1	Judul Bab VII: “Tindakan Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama”	“Tindak Pidana terhadap individu atas dasar agama, keyakinan atau kepercayaan”
	Judul Bagian Kesatu: Tindak Pidana terhadap Agama	Bagian Kesatu: Tindak Pidana terhadap individu atas dasar agama, keyakinan, atau kepercayaan”

Analisis:

- Judul ini tidak sejalan dengan perkembangan mutakhir yang menempatkan manusia (warga negara) sebagai subjek hukum yang dilindungi serta peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk ratifikasi perjanjian internasional, yang memuat kewajiban negara untuk melindungi kebebasan individu menganut agama. Subjek hukum yang dilindungi adalah penganut agama atau kepercayaan, warga negara Indonesia, bukan agama atau kepercayaan itu sendiri.

Pasal 304-305

2	Pasal 304: “Setiap Orang di muka umum yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”	(1) “Setiap orang yang dengan sengaja di muka umum menghasut kebencian terhadap orang lain atau golongan atau kelompok untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar agama, keyakinan atau kepercayaan diancam melakukan ujaran kebencian dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”
---	---	---

⁹ Pasal-pasal di sini mengacu pada Draf RKUHP versi September 2019.

		<p>(2) Barangsiapa yang menjadikan perbuatan pada ayat 1 untuk mendapatkan keuntungan atau menerima imbalan dipidana pasal 55.</p> <p>(3) Pejabat publik yang melakukan perbuatan pada ayat 1 diancam dengan pidana tambahan 1/3 dan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.</p>
3	<p>Pasal 305:</p> <p>(1) “Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p> <p>(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.”</p>	<p>(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p> <p>(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaan atau profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana seperti tercantum di pasal 304 (2).</p>

Analisis:

- Rumusan “penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia” (atau “penghinaan” di Pasal 308 di bawah) sebaiknya diganti dengan “hasutan untuk menyebarkan atau menyiarkan kebencian dengan maksud melakukan kekerasan, atau diskriminasi atas dasar agama atau kepercayaan atau keyakinan”, sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
- Hal ini penting untuk mencegah semakin suburnya perpecahan serta tindakan intoleransi yang ditimbulkan oleh penggunaan politik identitas keagamaan, yang telah terbukti memanfaatkan UU pencegahan penodaan agama selama ini.
- Pasal ini seharusnya dirumuskan untuk melindungi warga negara Indonesia dari tindakan intoleransi, kekerasan atau diskriminasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang hendak memecah belah kesatuan bangsa dengan menggunakan dalil agama atau lembaga keagamaan sendiri. Dalam rumusan aslinya, pasal ini justru memberikan insentif legal untuk kelompok intoleran dan memperkuat akar intoleransi.
- Mempertahankan “penghinaan terhadap agama” atau “penodaan agama” ini juga akan bertentangan dengan hukum internasional, termasuk kesepakatan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dimana Indonesia menjadi anggotanya. Resolusi Dewan HAM PBB 16/18 (2011), yang diinisiasi oleh negara-negara OKI, telah menggeser frase “penodaan agama” menjadi “memerangi intoleransi”, karena dipandang lebih tepat menyasar masalah hubungan antar dan intra agama yang terjadi di banyak negara anggota OKI, maupun negara-negara Barat.
- Terkait **hukuman** terhadap tindakan hasutan, para ahli/PBB (lihat misalnya dalam Rencana Aksi Rabat 2012) mengarahkan kepada pertanggungjawaban perdata bukan pidana. Kalaupun diatur dengan sanksi pidana, maka pembedanya adalah denda.
- Hasutan sendiri dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yakni hasutan kekerasan dan hasutan diskriminasi.
- Hukuman untuk *hasutan kekerasan* seharusnya lebih berbentuk: Menghentikan perbuatan, denda, dan mencabut pernyataan di depan umum. Sanksi pidana baru dikenakan jika:
 - a. Dalam konteks pertemuan umum, kerusuhan, bencana;
 - b. Pelaku merupakan Pembicara/Narasumber: pejabat publik, tokoh publik, yang memiliki banyak pengikut;
 - c. Dilakukan dengan sengaja (ada niat dan pengetahuan untuk melakukan kejahatan);
 - d. Bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Hukuman untuk *hasutan diskriminasi* seharusnya lebih berbentuk:
 - a. Menghentikan perbuatan, denda, dan mencabut pernyataan di depan umum;
 - b. Jika tidak mau dan/atau mengulangi kembali perbuatan, maka dapat **dikenakan sanksi pidana**.
- Menimbang bahwa “ujaran/hasutan kebencian” pun masih dapat ditafsirkan secara longgar, perlu ditambahkan rambu-rambu penafsirannya dalam Penjelasan terhadap KUHP, yang sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi oleh UU No. 12/2005, dan beberapa norma ikutannya (seperti Rencana Aksi Rabat 2012).

Pasal 306

4	Pasal 306: “Setiap Orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan seseorang terhadap agama apapun yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”	(1) Setiap orang yang dengan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk menganut agama atau kepercayaan, keyakinan selain pilihannya sendiri, dipidana dengan..... (2) Apabila dilakukan dengan memindahkan atau mengusir dengan kekerasan, akan diancam dengan pidana.... (3) Apabila dilakukan dengan cara diskriminatif, akan diancam dengan pidana....
---	---	--

Analisis:

- Salah satu permasalahan pasal ini terletak pada kata “hasutan” yang sangat multitafsir. Hasutan yang bisa dikriminalisasi sesuai dengan standar Hukum HAM Internasional adalah hasutan dengan maksud melakukan kekerasan atau diskriminasi.
- Kata “meniadakan keyakinan terhadap agama yang sah” juga membingungkan karena tidak jelas dan dapat ditafsirkan beragam. Unsur delik tersebut dapat diartikan meniadakan seluruh agama, atau hanya satu agama, dan/atau keyakinan di dalam agama. Tergantung penafsirannya, rumusan pasal itu justru dapat merugikan agama-agama yang ada di Indonesia. Meniadakan keyakinan juga multitafsir apakah maksudnya pada satu orang atau untuk meniadakannya sama sekali dari bumi Indonesia. Karenanya pasal ini tidak memenuhi asas perumusan delik pidana.
- Untuk memastikan kemerdekaan memeluk agama, sebagaimana dalam Pasal 29 UUD 1945, frasa “meniadakan keyakinan terhadap agama yang sah” lebih tepat diganti dengan “meniadakan kebebasan beragama atau berkeyakinan”, atau dalam rumusan seperti di atas.

Pasal 307

5	Pasal 307: (1) Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.	(1) Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
---	--	--

	<p>(2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p> <p>(3) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.</p>	<p>(2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.</p> <p>(3) Setiap Orang yang dengan sengaja membuat keributan (gaduh) di dekat bangunan atau tempat untuk menjalankan ibadah dengan tujuan mengganggu ibadah yang sedang berlangsung dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.</p>
--	---	---

Analisis:

- Kata “gaduh” dapat multi tafsir terkait sebesar apa suara sehingga dapat dikatakan gaduh. Untuk itu sebaiknya ditambahkan sebuah unsur “dengan maksud untuk mengganggu peribadatan”, sebagai *mens rea*. Sehingga “gaduh” bukan sebuah kondisi netral yang tanpa ukuran.

Pasal 308

6	<p>Pasal 308:</p> <p>“Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi 1: Hapus Pasal 308 • Rekomendasi 2: Setiap Orang yang di muka umum melakukan hasutan untuk kebencian, kekerasan atau diskriminasi terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.
---	--	---

Analisis:

- Meskipun semangat pasal ini baik tetapi kata “penghinaan” perlu diganti dengan kata lain yang tidak multitafsir. Sejalan dengan usulan di pasal-pasal sebelumnya, “penghinaan” seharusnya diganti dengan rumusan unsur yang lebih jelas dan obyektif seperti “hasutan untuk menyebarkan, menyiarkan kebencian dengan maksud melakukan kekerasan, atau diskriminasi”.
- Terkait jenis dan besar hukumannya, lihat Analisis untuk Pasal 304-305 di atas.

Pasal 309 dan 483(a)

7	Pasal 309: “Setiap Orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”	<ul style="list-style-type: none">• <i>Rekomendasi 1:</i> Pasal 309 dapat dihapus, karena pidana perusakan sudah diatur.• <i>Rekomendasi 2:</i> Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
8	Pasal 483(a): “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan: 1. Pencurian benda suci keagamaan;”	Pasal 483(a) diusulkan dihapus

Analisis:

- RUU KUHP sudah memuat pasal-pasal terkait “pencurian” (bab xxiv) dan “kerusakan properti” (bab xxix, bagian II). Pasal-pasal ini cukup dan juga berlaku pada artefak keagamaan dan tempat beribadah.
- Terkait pasal 483(a), argumen yang sama dapat diberikan. Lebih jauh, pasal ini justru dapat memunculkan pertanyaan mengenai kategori benda suci keagamaan, yang dapat berbeda di antara beberapa agama.